PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
KOMPLEKS PERKANTORAN TAKAWA GEDUNG D LANTAI 4
PASARWAJO

PENGUMUMAN
Nomor: 800.1.2.2/002/PANSELDA-BUTON/VIII/2024

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Buton memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

Jumlah kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 365 formasi, dengan rincian sebagaimana terlampir pada pengumuman.

II. KRITERIA PELAMAR

A. Penetapan Kebutuhan Umum diperuntukan bagi pelamar umum; dan

B. Penetapan Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas diperuntukan bagi pelamar penyandang disabilitas/kebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dengan kriteria:

1. Mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
2. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
3. Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda.

III. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran, kecuali untuk dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas ke instansi lain dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang telah dicabut status badan hukumnya;
13. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan/atau zat adiktif lainnya;
14. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
15. Tidak berstatus sebegai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan NIP/NI PPPK;
16. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

B. Persyaratan Khusus

1. Pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dengan syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima nol);
2. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;

3. Kualifikasi pendidikan bagi jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
4. Pelamar yang melamar pada formasi jabatan Polisi Pamong Praja jenjang keahlian wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Sebagai Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kabupaten Buton;
5. Pelamar yang melamar pada formasi jabatan Operator Alat Berat diwajibkan:
    a. Mahir mengoperasikan alat berat dibuktikan dengan Sertifikat/Surat Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh manager/HRD bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di perusahaan swasta dan minimal ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintah;
    b. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B2 umum yang masih berlaku saat pendaftaran;
6. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat mengajukan lamaran dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Melamar pada jabatan khusus untuk formasi penyandang disabilitas, dan pada saat melamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas; dan
    b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis/derajat kedisabilitasannya dan menggunggah link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK dengan ketentuan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
8. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan yang sudah dikelompokan oleh instansi, wajib mengunggah/mengupload dokumen sesuai yang dipersyaratkan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
2. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online.*
3. Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman https://sscasn.bkn.go.id sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud;

4. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi;
5. Setelah membuat akun dan mencetak Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2024, pelamar melakukan *login* ke laman https://sscasn.bkn.go.id dengan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
6. Pelamar melengkapi biodata, memilih jenis seleksi, memilih instansi, dan jabatan yang akan dilamar. Pastikan bahwa instansi yang dipilih adalah instansi pemerintah sesuai formasi yang dituju, karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan;
7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi daerah dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan CASN atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;

B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan berupa *scan* **dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih)** dengan ketentuan:

1. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Buton ditulis tangan pada kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman dengan menggunakan huruf kapital yang telah ditandatangani serta dibubuhi *e-materai* sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman dalam format pdf dengan ukuran file maksimal 1000 kb;
2. Surat Pernyataan 5 (lima) poin diketik komputer menggunakan kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman yang telah ditandatangani serta dibubuhi *e-materai* sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman dalam format pdf maksimal 1.000 kb;
3. KTP elektronik (e-KTP) dalam format JPG maksimal 500 kb;
4. Pasfoto terbaru berpakaian formal (memakai kemeja warna putih polos dan dasi warna hitam) berlatar belakang warna merah dengan pose setengah badan (bukan swafoto), jelas dan tidak miring dalam format JPG maksimal 300 kb;
5. Ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi jabatan yang dilamar dalam format pdf maksimal 1.000 kb;
6. Transkrip Nilai pendidikan terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan formasi jabatan yang dilamar (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan) dalam format PDF maksimal 1.000 kb;
7. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat **kelulusan** pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;
8. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi formasi Tenaga Kesehatan yang mempersyaratkan STR, yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;

9. Surat Keterangan bukan sebagai Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kabupaten Buton bagi pelamar formasi Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;
10. Surat Izin Mengemudi (SIM) B2 umum yang masih berlaku saat pendaftaran bagi pelamar formasi jabatan Operator Alat Berat, dalam format JPG maksimal 700 kb;
11. Sertifikat/Surat Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh manager/HRD bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di perusahaan swasta dan minimal ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintah bagi pelamar formasi jabatan Operator Alat Berat, dalam format PDF maksimal 1000 kb;
12. Khusus untuk pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas wajib mengunggah:
    a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dalam format Pdf dengan ukuran file maksimal 1.000 kb;
    b. Menyampaikan tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar. Pastikan bahwa tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia;
13. Hasil *scan* dokumen unggahan pelamar yang diunggah harus jelas terbaca, tidak buram, dan lengkap bagiannya (tidak terpotong). **Kesalahan dalam menggunggah dokumen persyaratan dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi;**

V. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Seleksi Administrasi
    a. Merupakan proses verifikasi data yang diinput dan dokumen yang diunggah pelamar berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan pada pengumuman ini. Dokumen lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi
    b. Bagi pelamar yang menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan tidak menginput link video keseharian pada laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
    c. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
2. Seleksi Kompetensi Dasar
    a. Seleksi kompetensi dasar diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
    b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40% menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;

c. Lokasi seleksi kompetensi rencananya akan dilaksanakan pada **Titik Lokasi Mandiri BKN Kota Baubau**;

d. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Ujian SSCASN 2024 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran;

e. Pelamar hanya dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, karena itu pelamar harus selalu melihat informasi terbaru pada media informasi instansi;

f. Materi seleksi kompetensi dasar meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, dan tes karakteristik pribadi;

g. Kriteria kelulusan seleksi kompetensi dasar ditentukan berdasarkan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional;

h. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023;

i. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun 2023;

   2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;

   3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;

   4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;

   5) Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan

   6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024;

j. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;

k. Dalam hal pelamar yang memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024;

l. Hasil seleksi kompetensi dasar akan diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

3. Seleksi Kompetensi Bidang

   a. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan;

   b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;

   c. Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;

VI. JADWAL SELEKSI

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS T.A 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman pasca sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dam Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dam Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 22 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP	22 Februari s.d 23 Maret 2025

Catatan : Jadwal bersifat tentatif, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website https://sscasn.bkn.go.id atau *https://bkpsdm.butonkab.go.id*

VII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar wajib membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Pemerintah Kabupaten Buton tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Buton, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
4. Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CASN Pemerintah Kabupaten Buton tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via pos. Seluruh rangkaian verifikasi berkas dilakukan secara online dengan melihat kesesuaian antara dokumen unggahan dan persyaratan sesuai ketentuan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pelamar diangkat sebagai CASN, diketahui sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar/tidak sesuai, maka kelulusan dan/ pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum;
6. Informasi resmi terkait dengan seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dapat dilihat dalam situs online Portal SSCASN Tahun 2024 https://sscasn.bkn.go.id, website BKPSDM Kabupaten Buton https://bkpsdm.butonkab.go.id, grup Facebook https://www.facebook.com/bkpsdm.buton, dan group Telegram **t.me/infoCASNButon**;
7. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada poin 6 (enam) untuk mendapatkan informasi dan pengumuman-pengumuman tentang seleksi penerimaan CASN Kabupaten Buton;
8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Pasarwajo, 16 Agustus 2024

Ketua Panitia Seleksi Daerah
Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Buton,



ASNAWI JAMALUDDIN, S.Pd., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 19680206 199403 1 004

Contoh Format Surat Lamaran (ditulis tangan)

PASARWAJO, 2024

YTH. **BUPATI BUTON**

DI –

PASARWAJO

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA	:
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:
JENIS KELAMIN	:
PENDIDIKAN	:
ALAMAT DOMISILI	:
NOMOR TELEPON/HP	:

DENGAN INI MENYAMPAIKAN SURAT LAMARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024 PADA JABATAN . . . . . .

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, DISAMPAIKAN DOKUMEN KELENGKAPAN YANG TELAH DIUNGGAH SEBAGAI BERIKUT:

1. IJAZAH PENDIDIKAN TERAKHIR SESUAI DENGAN SYARAT PADA JABATAN YANG DILAMAR;
2. TRANSKRIP NILAI/DAFTAR NILAI;
3. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTONIK;
4. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN YANG DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-METERAI;
5. SERTIFIKAT ATAU TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PADA PDDIKTI / BAN-PT DARI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI PADA SAAT KELULUSAN;
6. PAS FOTO SESUAI KETENTUAN PADA PENGUMUMAN; DAN
7. DOKUMEN TAMBAHAN SESUAI PERSYARATAN JABATAN.

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT, ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024. ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

e-Meterai
Rp.10.000

ditandatangani

(nama_lengkap)

Contoh Format Surat Pernyataan 5 Poin (diketik komputer)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau Pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat Politik Praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Buton, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Pasarwajo, 2024

Yang membuat pernyataan,

e-Meterai
Rp.10.000

ditandatangani
(nama_lengkap)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 414 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A.	TENAGA KESEHATAN	206	204	2	
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PENUNJANG MEDIK | SEKSI LABORATORIUM FARMASI DAN RADIOLOGI | UNIT APOTEK
4	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO
5	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PENUNJANG MEDIK | SEKSI LABORATORIUM FARMASI DAN RADIOLOGI | UNIT LABORATORIUM
6	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	1	1	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT BERSALIN | UNIT PERAWATAN OBGYN
7	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN
8	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	1	1	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG BINA PROGRAM | SEKSI DATA DAN REKAM MEDIS
9	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAOLEONA KECAMATAN LASALIMU

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
10	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN KAPONTORI
11	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN
12	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
13	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
14	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PENUNJANG MEDIK | SEKSI LABORATORIUM FARMASI DAN RADIOLOGI | UNIT APOTEK
15	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN LASALIMU
16	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
17	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAOLEONA KECAMATAN LASALIMU
18	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
19	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN
20	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PENUNJANG MEDIK | SEKSI LABORATORIUM FARMASI DAN RADIOLOGI | UNIT APOTEK
21	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAKAOKILI KECAMATAN PASARWAJO
22	BIDAN AHLI PERTAMA	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT NICU
23	BIDAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT BERSALIN | UNIT UGD OBGYN

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
24	BIDAN AHLI PERTAMA	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT BERSALIN | UNIT PERAWATAN OBGYN
25	BIDAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
26	BIDAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN WABULA
27	BIDAN TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAOLEONA KECAMATAN LASALIMU
28	BIDAN TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TUANGILA KECAMATAN KAPONTORI
29	BIDAN TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
30	BIDAN TERAMPIL	3	3	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
31	BIDAN TERAMPIL	3	3	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT NICU
32	BIDAN TERAMPIL	3	3	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT BERSALIN | UNIT PERAWATAN OBGYN
33	BIDAN TERAMPIL	5	5	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT BERSALIN | UNIT UGD OBGYN
34	BIDAN TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT ISOLASI
35	BIDAN TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
36	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KUMBEWAHA KECAMATAN SIOTAPINA
37	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
					KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAOLEONA KECAMATAN LASALIMU
38	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	5	5	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | SMF STAF MEDIK FUNGSIONAL | SMF DOKTER UMUM
39	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN
40	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN SIOTAPINA
41	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN KAPONTORI
42	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN LASALIMU SELATAN
43	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
44	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN WABULA

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
45	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
46	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN LASALIMU
47	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO
48	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAOLEONA KECAMATAN LASALIMU
49	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN
50	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
51	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
52	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
					KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KUMBEWAHA KECAMATAN SIOTAPINA
53	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN KAPONTORI
54	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TUANGILA KECAMATAN KAPONTORI
55	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN WABULA
56	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB. BUTON
57	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
58	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
59	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN LASALIMU

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
60	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAKAOKILI KECAMATAN PASARWAJO
61	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PENUNJANG MEDIK | SEKSI GIZI DAN LOUNDRY | UNIT GIZI
62	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAOLEONA KECAMATAN LASALIMU
63	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
64	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
65	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BARANGKA KECAMATAN KAPONTORI
66	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
67	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	3	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT NICU
68	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	3	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT ISOLASI
69	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN LASALIMU
70	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT RAWAT JALAN | POLI ANAK
71	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT INTERNA
72	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAOLEONA KECAMATAN LASALIMU

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
73	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT PERAWATAN ANAK
74	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
75	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT BEDAH
76	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT RAWAT JALAN | POLI UMUM
77	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	3	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT GAWAT DARURAT
78	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO
79	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
					KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN WABULA
80	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT RAWAT JALAN | POLI INTERNA
81	PERAWAT TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAOLEONA KECAMATAN LASALIMU
82	PERAWAT TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT BEDAH
83	PERAWAT TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT ISOLASI
84	PERAWAT TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
85	PERAWAT TERAMPIL	4	4	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT GAWAT DARURAT

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
86	PERAWAT TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT PERAWATAN ANAK
87	PERAWAT TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB. BUTON
88	PERAWAT TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO | WAKOKO
89	PERAWAT TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO | LAPODI
90	PERAWAT TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN LASALIMU
91	PERAWAT TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT KAMAR OPERASI
92	PERAWAT TERAMPIL	4	4	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI PELAYANAN MEDIK | UNIT INTERNA

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
93	PERAWAT TERAMPIL	4	4	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN MEDIK | SEKSI KEPERAWATAN | UNIT NICU
94	PERAWAT TERAMPIL	3	3	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO
95	PERAWAT TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
96	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	4	4	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG BINA PROGRAM | SEKSI DATA DAN REKAM MEDIS
97	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
98	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
99	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN PASARWAJO

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
100	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	3	3	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG BINA PROGRAM | SEKSI DATA DAN REKAM MEDIS
101	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB. BUTON
102	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
103	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN
104	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PENUNJANG MEDIK | SEKSI LABORATORIUM FARMASI DAN RADIOLOGI | UNIT LABORATORIUM
105	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAOLEONA KECAMATAN LASALIMU
106	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB. BUTON

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
107	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAKAOKILI KECAMATAN PASARWAJO
108	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
109	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	5	5	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PENUNJANG MEDIK | SEKSI LABORATORIUM FARMASI DAN RADIOLOGI | UNIT LABORATORIUM
110	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
111	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN KAPONTORI
112	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN
113	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PENUNJANG MEDIK | SEKSI LABORATORIUM FARMASI DAN RADIOLOGI | UNIT RADIOLOGI

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
114	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PENUNJANG MEDIK | SEKSI LABORATORIUM FARMASI DAN RADIOLOGI | UNIT RADIOLOGI
115	TEKNISI GIGI TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
116	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG PENUNJANG MEDIK | SEKSI LABORATORIUM FARMASI DAN RADIOLOGI | UNIT TRANFUSI DARAH
117	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN KAPONTORI
118	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN
119	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
120	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
121	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAOLEONA KECAMATAN LASALIMU
122	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN
123	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG BINA PROGRAM | SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI | KESLING
124	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB. BUTON
125	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	3	3	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
126	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
127	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAKAOKILI KECAMATAN PASARWAJO

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
128	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN
129	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
130	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN
131	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LAWELE KECAMATAN LASALIMU
132	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BARANGKA KECAMATAN KAPONTORI
133	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WAJAH JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
B.	TENAGA TEKNIS		159	154	5	
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN SIOTAPINA | KECAMATAN SIOTAPINA | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
2	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN PASARWAJO | KECAMATAN PASARWAJO | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
4	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN LASALIMU SELATAN | KECAMATAN LASALIMU SELATAN | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN LASALIMU | KECAMATAN LASALIMU | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
6	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN WABULA | KECAMATAN WABULA | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
7	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
8	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN WOLOWA | KECAMATAN WOLOWA | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
9	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
10	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN KAPONTORI | KECAMATAN KAPONTORI | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
11	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	S-1 AKUAKULTUR ; S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; D-IV SUMBER DAYA AKUATIK ; D-IV SUMBER DAYA PERAIRAN	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERIKANAN | BIDANG PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI SYARIAH ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN REKAYASA	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, SDMK DAN PERIZINAN
14	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	2	1	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN, PROMOSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
15	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	3	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
16	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	1	1	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN | SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
17	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
19	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TENAGA KERJA | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TRANSMIGRASI | SEKRETARIAT DINAS TRANSMIGRASI | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU I
23	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU III
24	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU II

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
25	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	4	4	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI
26	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU I
27	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU II
28	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
29	OPERATOR ALAT BERAT	SLTA UMUM	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG JASA KONSTRUKSI
30	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN PASARWAJO | KECAMATAN PASARWAJO | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
31	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
32	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN LASALIMU | KECAMATAN LASALIMU | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
33	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN LASALIMU SELATAN | KECAMATAN LASALIMU SELATAN | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
34	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN WABULA | KECAMATAN WABULA | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
35	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN KAPONTORI | KECAMATAN KAPONTORI | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
36	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
37	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN SIOTAPINA | KECAMATAN SIOTAPINA | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
38	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | KECAMATAN | KECAMATAN WOLOWA | KECAMATAN WOLOWA | SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
39	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
40	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 REKAYASA SISTEM ENERGI ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERMUKIMAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
41	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 REKAYASA SISTEM ENERGI ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
42	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 REKAYASA SISTEM ENERGI ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TRANSMIGRASI | BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAAN TRANSMIGRASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
43	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 REKAYASA SISTEM ENERGI ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TRANSMIGRASI | BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
44	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
45	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN
46	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	D-III TEKNIK LINGKUNGAN ; D-III GEOGRAFI ; D-III STATISTIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK SIPIL	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
47	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	4	4	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI
48	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	4	4	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU II
49	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU I

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
50	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III GIZI ; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS ; D-III TERAPI WICARA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
51	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
52	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
53	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; D-IV AGRIBISNIS PANGAN ; D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN ; D-IV AGRIBISNIS PETERNAKAN ; D-IV PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN ; D-IV PENYULUHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN ; D-IV PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING ; D-IV PENYULUHAN PETERNAKAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN ; D-IV TEKNOLOGI BENIH ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK ; S-1 PERIKANAN TANGKAP ; S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN ; S-1 PETERNAKAN	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TRANSMIGRASI | BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PENCADANGAN AREAL
54	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI
55	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
56	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU II

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
57	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
58	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
59	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SUB BAGIAN KEUANGAN
60	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG BINA PROGRAM | SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
61	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SUB BAGIAN PROGRAM
62	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	1	1	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
63	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
64	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TENAGA KERJA | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA | SUB BAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN, PERENCANAAN PROGRAM DAN EVAPOR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		PUBLIK ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN				
65	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TRANSMIGRASI | SEKRETARIAT DINAS TRANSMIGRASI
66	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG SUMBER DAYA AIR
67	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	10	10	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN | SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
68	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	10	10	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN | SEKSI KETERTIBAN UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
69	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SUB BAGIAN KEUANGAN
70	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
71	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TRANSMIGRASI | BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PENCADANGAN AREAL
72	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	2	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BIDANG BINA PROGRAM | SEKSI DATA DAN REKAM MEDIS
73	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
74	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
75	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
76	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
77	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEBUDAYAAN | BIDANG KESEJARAHAN, BINA NILAI BUDAYA DAN KESENIAN TRADISIONAL
78	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
79	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
80	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN
81	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TENAGA KERJA | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
82	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
83	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERDAGANGAN | SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
84	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TRANSMIGRASI | SEKRETARIAT DINAS TRANSMIGRASI | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
85	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TRANSMIGRASI | SEKRETARIAT DINAS TRANSMIGRASI
86	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL | SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
87	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
88	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
89	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERMUKIMAN
90	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
91	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
92	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
93	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
94	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | SUB BIDANG REHABILITASI
95	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS SOSIAL | BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
96	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	1	1	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN, PROMOSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR
97	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
98	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
99	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEBUDAYAAN | BIDANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN
100	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KESEHATAN | UPTD KESEHATAN | RSUD PASARWAJO | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
101	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN
102	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SUB BAGIAN PROGRAM
103	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS TENAGA KERJA | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA | SUB BAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN, PERENCANAAN PROGRAM DAN EVAPOR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
104	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | SEKSI KEWASPADAAN DINI
105	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | PEMERINTAH KABUPATEN BUTON | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN

Pj. BUPATI BUTON,

LA HARUNA